



LAKIP



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya LAKIP dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kami serta informasi yang disajikan, Olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Polewali, 6 Pebruari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Polewali Mandar



Hj. Ashah Rahim, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680428 198910 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel, Bagan, Chart dan Gambar.....	iii
BABI. I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	3
3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan.....	4
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	5
1. Kedudukan OPD.....	5
2. Kondisi Organisasi.....	8
3. Isu Strategis Organisasi.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	23
A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.....	23
B. Akuntabilitas Keuangan	71
BAB IV. PENUTUP.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	

DAFTAR BAGAN, TABEL, CHART DAN GAMBAR

Bagan	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.	7
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Eselon	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024	18
Tabel 2.2	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022	24
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022	31
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022	40
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022	48
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022	57
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022	65
Tabel 3.7	Jenis Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Langsung	70
Tabel 3.8	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Kesbangpol Tahun 2022	74
Chart 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)	27
Chart 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)	35
Chart 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)	43
Chart 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)	52
Chart 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)	61
Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)	66
Chart 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022	72

Gambar 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024	17
Gambar 3.1 Kegiatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	30
Gambar 3.2 Kegiatan Pendidikan Politik	38
Gambar 3.3 Kegiatan Verifikasi Bantuan keuangan Parpol	39
Gambar 3.4 Kegiatan Kewaspadaan Dini	46
Gambar 3.5 Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Ormas	56
Gambar 3.6 Kegiatan Peningkatan Toleransi Umat Beragama dan Sosialisasi P4GN	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan peraturan Presiden No. 29 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sehingga bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024, yaitu ***“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”***.

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas pelaporan kinerja instansi pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Pada Bab XXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Paragraf 1 kedudukan dan Paragraf 2 Tugas dan Fungsi
- g. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

- h. Surat Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar, Nomor: B-04/000.8.6/Org/I/2023 Tanggal 12 Januari 2022, Perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022;

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepada Bupati Polewali Mandar sebagaimana telah ditetapkan dalam dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan dan Sub kegiatan maupun penggunaan sumber daya khususnya pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Sebagai pedoman dalam melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan OPD

Berdasarkan struktur Kepegawaian OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu Unsur Penujang Pemerintahan memiliki susunan organisasi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Pasal 9 Ayat (3) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Pada Bab XXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Paragraf 1 kedudukan dan Paragraf 2 Tugas dan Fungsi, dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut :



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di Bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait. Susunan Organisasi Sekretariat Sebagaiman dimaksud dalam Pasal 426, terdiri atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas Sub Bagian, sebagai berikut :

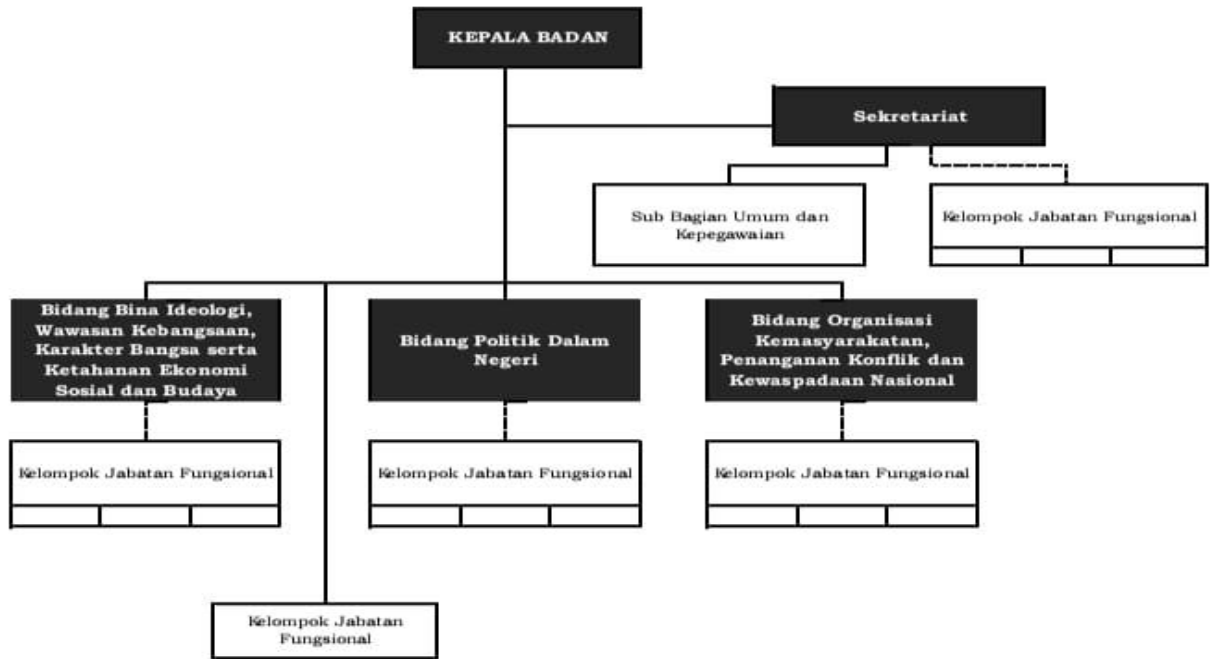
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, Karakter bangsa serta Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Susunan Organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri. Susunan Organisasi Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam 425 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri. Susunan Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

XXVIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Polewali Mandar mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Terkait dengan Tugas dan Fungsinya

2. KONDISI ORGANISASI

a. Sumber Daya Organisasi

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Eselon Tahun 2022

No	Jabatan	Eselon	Jumlah		Ket
			L	P	
1	Kepala Badan	II. b	-	1	1
2	Sekretaris Badan	III.a	-	1	1
3	Kepala Bidang	III.b	-	3	3
4	Kepala Sub Bagian	IV.a	1	-	1
Jumlah			1		6

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah		Ket
		L	P	
1	IV	1	6	7
2	III	5	6	11
3	II	0	2	2
4	I	-	-	0
Jumlah		9	12	20

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 20 orang ASN, terdiri dari Golongan II : 2 orang; Golongan III : 11 orang; Golongan IV : 7 orang;

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Ket
		L	P	
1	SD	-	-	
2	SMP	-	-	-
3	SMA/SLTA		2	2
4	D.III	-	2	2
5	SI	4	4	8
6	S2	2	6	8
Jumlah		6	14	20

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 20 orang ASN yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, sebanyak 8 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 8 orang berpendidikan Strata 1 (Sarjana), 2 orang pegawai berpendidikan Diploma III, 2 orang berpendidikan SLTA.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

keseharian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat tenaga PTT/ Tenaga Honorer. Adapun jumlah tenaga PTT dimaksud tersebut sebanyak 13 Orang, terdiri atas petugas pembersih sebanyak 1 orang, Supir 1 Orang, Operator dan Tenaga Administrasi 11 Orang.

3. Isu Strategis Organisasi

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah memiliki fungsi antara lain Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan pembinaan kesatuan bangsa serta Peningkatan stabilitas keamanan dan Perkembangan Politik dalam negeri. Sesuai dengan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan upaya melalui penetapan program kerja berupa Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. pengembangan wawasan kebangsaan dilakukan upaya antara lain memberikan pemahaman wawasan kebangsaan berupa penguatan empat pilar kebangsaan kepada generasi muda dan masyarakat, Dalam bidang pendidikan politik dilakukan upaya antara lain Pemantauan, Evaluasi dan



Pelaporan Perkembangan Politik Di daerah, serta Kegiatan fasilitasi verifikasi bantuan keuangan Parpol dan Sosialisasi pendidikan politik di sekolah yang ada di kabupaten polewali mandar.

Untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan maka dilakukan upaya antara lain penyelenggaraan Kewaspadaan Dini melalui Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberadaan ormas dan melakukan tertib administrasi ormas dan adanya ormas yang mendapatkan bantuan hibah ormas dalam rangka mendukung kinerja ormas Untuk pengembangan Ketahanan ekonomi sosial dan budaya dilakukan upaya antara lain kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, kegiatan penyelenggaraan rakor pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan, dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) untuk menyelaraskan pemahaman mengenai obat-obtan terlarang dan cara mencegahnya

Upaya-upaya sebagaimana di atas telah membantu menciptakan situasi kondusif dalam kehidupan masyarakat Kab.Polewali Mandar.

a. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sejalan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang maka berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat baik dari aspek ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya serta keamanan senantiasa dapat terjadi. Oleh karena itu faktor-faktor berupa infrastruktur jalan yang kurang baik terutama di daerah pelosok, sarana mobilitas Badan yang belum memadai hingga kualitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih kurang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor.

Faktor-faktor sebagaimana di atas berpengaruh besar terhadap kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar yang harus bekerja secara offensive bukan lagi deffensive dalam menyikapi dinamika sosial dan politik yang terus menerus harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan di masyarakat

- **Tantangan dan Peluang**

Stabilitas keamanan, ekonomi sosial dan budaya serta politik yang tetap terjaga merupakan prasyarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diupayakan terus menerus tercipta di tengah masyarakat. dengan demikian hal-hal seperti aturan/nilai-nilai budaya yang hidup/mengikat masyarakat, kemajuan teknologi informasi, pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama, berkembangnya perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan dan sebagainya merupakan entitas yang perlu dikelola sebagai peluang dalam mendukung kelancaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Identifikasi permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah :

- a. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;

2. Toleransi :

- a. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat terutama akibat penurunan tingkat ekonomi karena terjadinya pandemi covid 19;
- b. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu;

c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budi luhur, budi pekerti dan etika budaya bangsa yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat;

d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.

3. Demokrasi :

a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;

b. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pilkada dan pilkades.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arah kebijakan strategis pembangunan 2019-2024, sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Berdasarkan hasil pelaksanaan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

Selain itu, pada tahun 2016 terdapat perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sehingga dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terhadap

kebijakan tersebut melalui perubahan struktur kelembagaan di Kabupaten Polewali.

Renstra periode 2019-2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan sebagai pedoman kerja operasional dan kerangka manajemen program bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten PolewaliMandar, yang bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Rencana Strategis, dirumuskan , Sebagai berikut :

Visi

“ Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera.”

Polewali Mandar Maju :

Didefinisikan kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian

Rakyat Sejahtera :

Didefenisikan kondisi masyarakat yang memiliki hidup yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Misi

1

Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius

2

Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah

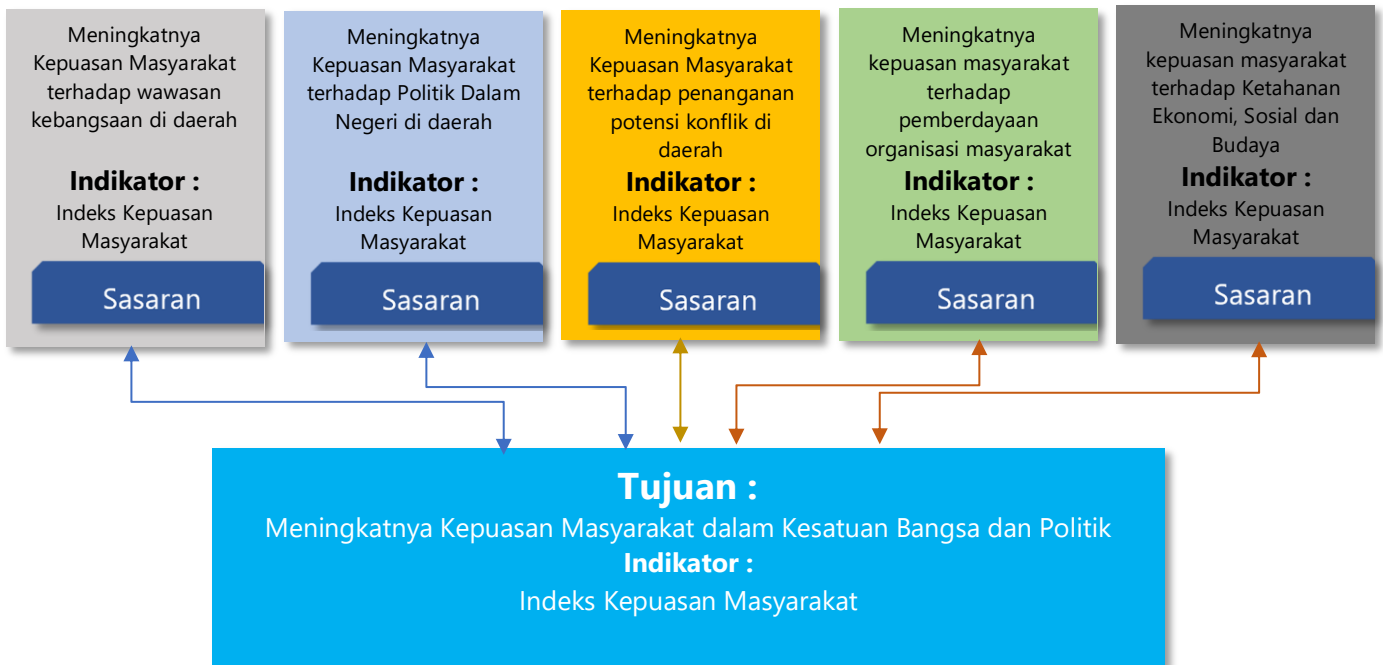
3

Mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan

4

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

Gambar 2.1
 Tujuan dan Sasaran Strategis
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Tahun 2019-2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB	BB	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	93.33%	95.56%	93.33%	95.56%	97.78%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Badan Kesatuan Bangsa dan politik telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan kebangsaan di daerah

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik



**Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah**

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
**Target :
Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah**

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
**Target :
Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
**Target :
Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
**Target :
Sangat Baik**



**Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Memerintahkan Perangkat Daerah**

Indikator :
Predikat SAKIP perangkat daerah
Target : A
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah
Target : 100%
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah
Target : Sangat Baik

Untuk mencapai sasaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 51.765.800,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.1.098.989.800,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 286.194.600,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 64.939.600,-
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 67.128.800,-
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.2.490.907.457,-
J u m l a h		Rp.4.059.926.057,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

**Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
Wawasan Kebangsaan di Daerah**



Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat
Target :
Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	Sangat Baik (85)	85 %

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, predikat indeks kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2022, yaitu dari target sangat baik (85-100%) terealisasi sangat baik (85,00%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada :

- a. Organisasi politik
- b. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga nirlaba lainnya
- c. Pegawai negeri sipil
- d. Guru / penyidik; dan
- e. Tokoh agama/masyarakat/adat

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan :

- a. Pembangunan karakter bangsa
- b. Pelibatan Kerjasama multipihak
- c. Keterbukaan
- d. Kreatifitas
- e. Integritas antara ucapan, pikiran dan Tindakan;dan
- f. Penggalian dan penggunaan muatan lokal

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

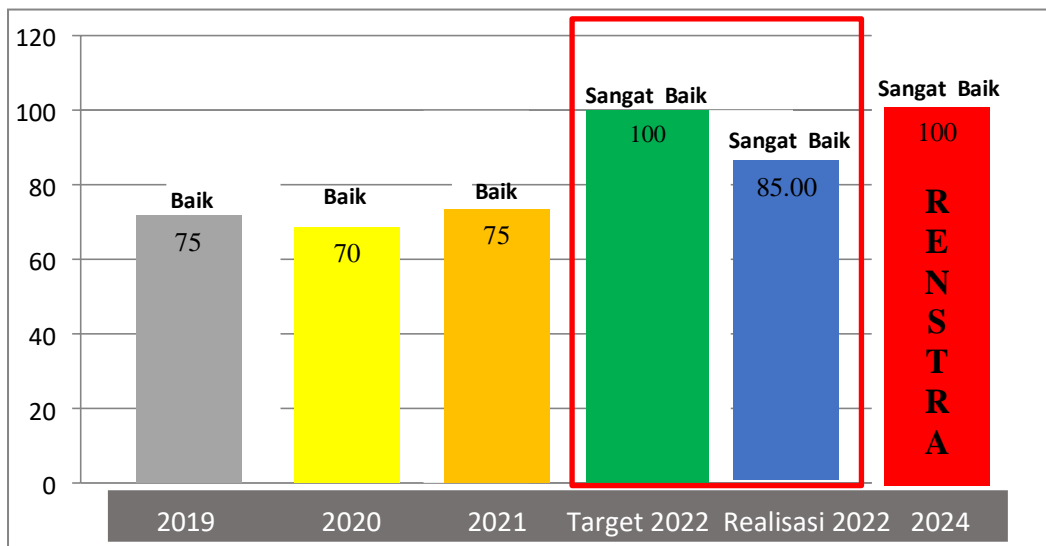
- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

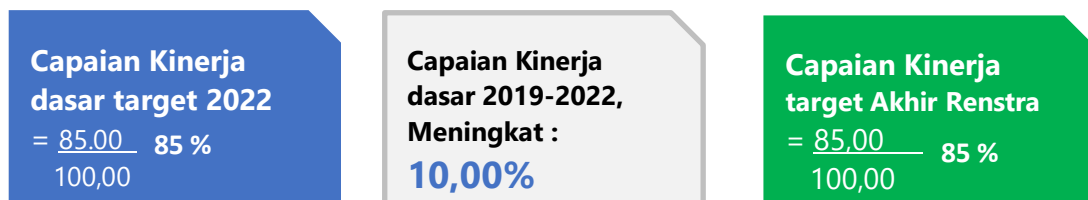
Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran I untuk tahun 2022, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemahaman wawasan kebangsaan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan adalah target sasaran sesuai pedoman penyelenggaraan wawasan kebangsaan dengan melibatkan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa dengan Jumlah Peserta 34 orang untuk lomba baca puisi puisi empat pilar dan masuk kategori baik sekali (85-100) dari target 40 orang terealisasi 85 %. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah Institusi yang berpartisipasi dalam kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan dengan jumlah institusi yang ditargetkan dalam dalam mendukung pemahaman wawasan kebangsaan tahun 2022 adapun peserta lomba baca puisi dalam mendukung penyelenggaraan wawasan kebangsaan sebagai berikut :

No.	Nama LSM / Institusi	Jumlah
1	LSM Apkan	2
2	LSM Kobra	2
3	ITBM	2
4	LP- KPK Sulbar	1
5	LSM Amperak	2
6	LSM Mandat	1
7	LPM	1
8	LPA	1
9	LP-HAM Sulbar	1
10	MILUH	1
11	GEBRAK	1
12	Unasman	6
13	LPK	2
14	STIMIK Hasan Sulur	1
15	Amperak	1
16	Ormas LAKI	1
17	LPB	1
18	LPPAM	2
19	IAI DDI Polman	2
20	Akper YPP Wonomulyo	1
21	Yayasan Mandar Indonesia	1
22	Laskar Merah Putih	1

Chart 3.1
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)



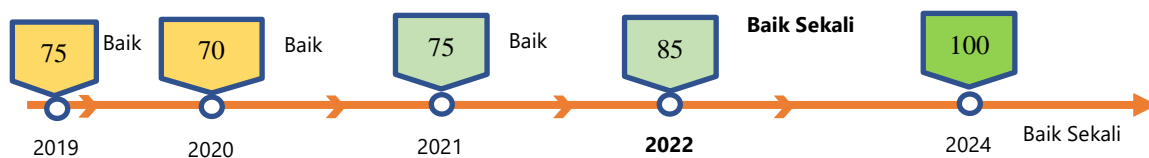
Sumber : Bidang Bidang Bina Ideologi Wasbang, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekosbud , Januari 2022



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2022 mencapai 85 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 10,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat (75%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat tahun 2020 juga masih pada level baik (70%). Hal ini dipengaruhi belum optimalnya metode pemahaman wawasan kebangsaan terhadap masyarakat berupa masih minimnya sosialisasi disebabkan tahun 2020 tersebut anggaran difocusing akibat pandemi covid-19. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemahaman Wawasan kebangsaan

Masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2021 (75,00 %). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan dengan adanya sosialisasi kepada target 2021 yaitu kelompok sebatas kelompok pelajar sehingga target dan realisasi untuk tahun 2022 sudah di perluas dari indikator penyelenggaraan wawasan kebangsaan ke kelompok Lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 85,00%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Penyelenggaraan Pemahaman wawasan kebangsaan
- Telah melibatkan peserta tidak hanya sebatas kelompok pelajar dan mahasiswa tapi juga kelompok masyarakat.

Faktor Penghambat :

- Belum terbentuk nya Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sebagaimana amanat permendagri 71 tahun 2012 di Polewali Mandar
- Kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat dalam hal pemahaman wawasan kebangsaan yang mencakup empat pilar kebangsaan disebabkan setiap tahun terbatas jumlah peserta yang disasar

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Intens berkomunikasi dengan anggota MPR RI Dapil Sulbar terkait tugasnya dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan didaerah untuk senantiasa Bersama dengan jajaran kesbangpol
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarkan informasi terkait empat pilar kebangsaan
- Segera membentuk Pokja PPWK melalui Keputusan Bupati untuk melakukan upaya percepatan penyebaran Pendidikan wawasan kebangsaan.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan didaerah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 51.765.800,-	Rp. 51.755.800,-	99,98
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikad an Sejarah Kebangsaan	Rp. 51.765.800 ,-	Rp. 51.755.800,-	99,98

Gambar 3.1. Kegiatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan



**Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada sasaran strategis II digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Politik dalam negeri di daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	Sangat Baik (100)	100 %

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis II, predikat indeks kepuasan masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2022, yaitu dari target sangat baik (85-100%) terealisasi sangat baik (100,00%).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan politik , mengisyaratkan pentingnya mengoptimalkan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik dan memberikan kemudahan bagi partai politik, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan Lembaga atau instansi vertical di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan Pendidikan politik di daerah

Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan antara lain :

- a. Seminar dan lokakarya
- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan
- c. Asistensi , pelatihan dan bimbingan teknis
- d. Pagelaran seni dan budaya
- e. Jambore, perkemahan dan napak tilas dan;
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya ilmiah, film documenter, dan cipta lagu.

Kelompok sasaran terkait fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik meliputi :

- a. Partai politik
- b. Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan
- c. Lembaga nirlaba lainnya
- d. Lembaga atau instansi vertikal di daerah

Materi atau muatan dalam fasilitasi Pendidikan politik baik wajib dan pilihan sebagai berikut :

- a. Pancasila
- b. UUD 1945
- c. Demokrasi
- d. Hak asasi manusia
- e. System pemerintahan
- f. Budaya dan etika politik
- g. Pendidikan kewarganegaraan
- h. Dll.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran II untuk tahun 2022, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah yang meliputi :

1. kegiatan sosialisasi Pendidikan politik adalah target sasaran sesuai pedoman fasilitasi Pendidikan politik dengan melibatkan unsur pelajar di dua zona dengan Jumlah Peserta 60 orang untuk Pendidikan politik dan masuk kategori baik sekali (85-100) dari target 60 orang terealisasi 100 %. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah Institusi yang berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan politik dengan jumlah institusi yang ditargetkan dalam dalam mendukung pemahaman politik di masyarakat, adapun Sekolah dalam mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik sebagai berikut :

Zona 1 meliputi :

- a. SMA 1 Polewali
- b. SMA 2 Polewali
- c. SMA 3 Polewali
- d. SMK Neg. 1 Polewali
- e. SMA Matakali
- f. SMA 1 Wonomulyo
- g. SMK PP Binuang

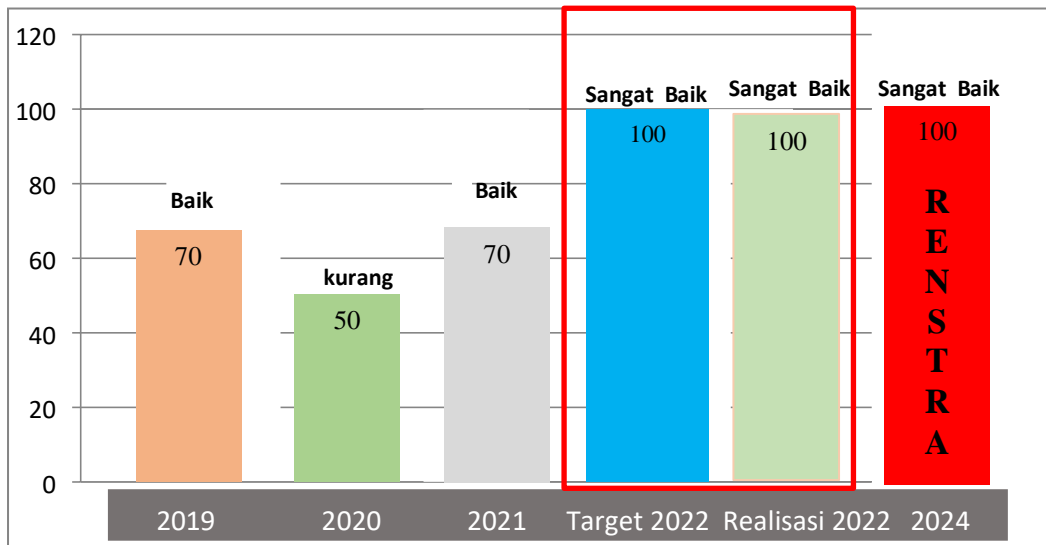
Zona 2 Meliputi :

- a. SMA 1 Campalagian
- b. SMK Labuang
- c. SMK Balanipa
- d. SMA 1 Tinambung
- e. SMK 1 Tinambung
- f. SMK Limboro

2. Bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD kabupaten Polewali Mandar dengan Jumlah parpol 11 untuk mendukung kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap politik dalam negeri dan masuk kategori baik sekali (85-100) dari target 11 parpol terealisasi 100 %. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah partai politik yang menadapatkan bantuan keuangan dengan jumlah parpol yang ditargetkan dalam dalam mendukung pemahaman politik di masyarakat, adapun partai politik yang mendapat bantuan keuangan dalam mendukung penyelenggaraan fasilitasi pendidikan politik sebagai berikut :

No	Nama Parpol	Total Suara	Nilai Suara	Bantuan/ Tahun (Rp)	Bantuan/ Semester (Rp)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	26.577	3.960	105.244.920	52.622.460
2	Partai Gerindra	26.499	3.960	104.936.040	52.468.020
3	PDI Perjuangan	27.085	3.960	107.256.600	53.628.300
4	Partai Golkar	38.587	3.960	152.804.520	76.402.260
5	Partai Nasdem	24.735	3.960	97.950.600	48.975.300
6	Partai Keadilan Sejahtera	13.322	3.960	52.755.120	26.377.560
7	Partai Perindo	7.636	3.960	30.250.440	15.125.220
8	Partai Persatuan Pembangunan	13.252	3.960	52.477.920	26.238.960
9		23.462	3.960	92.909.520	46.454.760
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.673	3.960	22.465.080	11.232.540
11	Partai Demokrat	21.388	3.960	84.696.480	42.348.240
	JUMLAH	228.210		903.711.600	451.885.800

Chart 3.2
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
 Terhadap Politik Dalam Negeri di Daerah
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Politik Dalam Negeri , Januari 2022



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2022 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap politik dalam negeri (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah tahun 2020 berada di level kurang (50%). Hal ini dipengaruhi belum optimalnya metode Pendidikan politik terhadap unsur partai politik, pemuda dan stakeholder terkait berupa disebabkan tahun 2020 tersebut anggaran

direfocusing akibat pandemi covid- 19. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politik dalam negeri berupa Pendidikan politik mengalami peningkatan pada tahun 2022 (100,00 %). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman masyarakat akan Pendidikan politik dengan adanya sosialisasi kepada target 2021 yaitu kelompok sebatas sosialisasi dengan menyebarkan brosur dan sanduk ke sejumlah sekolah sehingga target dan realisasi untuk tahun 2022 sudah di perluas dari indikator Pendidikan politik ke pada pemilih pemula dengan sudah dapat menjangkau 2 zona lokasi pelaksanaan sosialisasi serta terkait bantuan keuangan parpol sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilaksanakan dengan realisasi 100 % dengan jumlah target 11 parpol yang mendapatkan bantuan keuangan parpol .

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Pedoman Pendidikan Politik
- Telah melibatkan Unsur Partai Politik serta pelajar dalam Proses Pendidikan Politik.

Faktor Penghambat :

- Belum optimalnya monitoring terhadap partai politik setelah mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah sehingga belum dapat diukur seperti apa progres penggunaan anggaran yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan politik
- Sosialisasi pendidikan politik belum sepenuhnya optimal disebabkan masih sebatas pemilih pemula seharusnya menyasar juga kelompok masyarakat dari kalangan perempuan

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Mengupayakan lebih intens berkomunikasi dengan partai politik supaya senantiasa dilibatkan dalam proses Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sehingga informasi dari pemerintah lebih terarah dalam pemahaman politik dimasyarakat
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah dalam mensosialisasikan Pendidikan politik
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarluaskan informasi terkait Pendidikan politik kepada masyarakat

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap politik dalam negeri di daerah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Rp. 1.002.989.800,-	Rp. 1.002.701.400,-	99,97
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik	Rp. 925.461.800,-	Rp. 925.173.400,-	99,96
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi			

<p>di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</p>	<p>RP. 46.762.200,-</p>	<p>RP. 46.762.200,-</p>	<p>100</p>
<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik</p>	<p>Rp. 30.765.800,-</p>	<p>Rp. 30.765.800,-</p>	<p>100</p>

Gambar 3.2. Kegiatan Pendidikan Politik





Gambar 3.3 Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol



**Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penanganan Potensi Konflik di Daerah**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada sasaran Strategis 3, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	100.00%	100.00%

Dalam rangka melakukan Kewaspadaan dini di daerah sangat penting dilaksanakan dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas di daerah sesuai amanat Permendagri nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah sebagaimana pasal 10 ayat 2 dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kabupaten/kota mempunyai tugas :

- a) Merencanakan melaksanakan dan merusmuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di kabupaten/kota.
- b) Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai poternsi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG didaerah.
- c) Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim keewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah _____ kabupaten/kota dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi,

gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d) Memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian Dini dan Pencegahan dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran III untuk tahun 2022, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap penanganan poternsi konflik di daerah yang meliputi :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah di bentuk untuk melakukan kegiatan cegah dini dan deteksi dini terhadap segala potensi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah baik dari potensi, gejala yang ditimbulkan terkait Ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan yang terjadi di masyarakat. Potensi konflik sepanjang tahun 2022 yang ditemukan oleh Tim TKDD sebanyak 32 potensi konflik. Potensi konflik terkait Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya berdasarkan unjuk rasa dikabupaten polewali mandar menurut kelompok pelaku yang berpotensi konflik sosial. Dari hasil deteksi dini dan cegah dini dianggap berpotensi terjadinya konflik dan berhasil ditangani sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga tidak berdampak signifikan dalam mengganggu stabilitas keamanan di daerah, sehingg realisasi potensi konflik yang tertangani sebanyak 32 potensi konflik dibagi jumlah potensi konflik sepanjang tahun 2022 dapat direalisasikan kategori sangat baik dengan persentase 100 %.

2. Kegiatan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) juga dilaksanakan dalam rangka mendukung dan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah didaerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan didaerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah sehingga perlu dilakukan koordinasi secara berkala sehingga dapat sehingga keamanan dan kenyamanan di masyarakat dapat di capai sehingga tidak terjadi gejolak yang dapat mengganggu stabilitas bidang ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya serta keamanan.

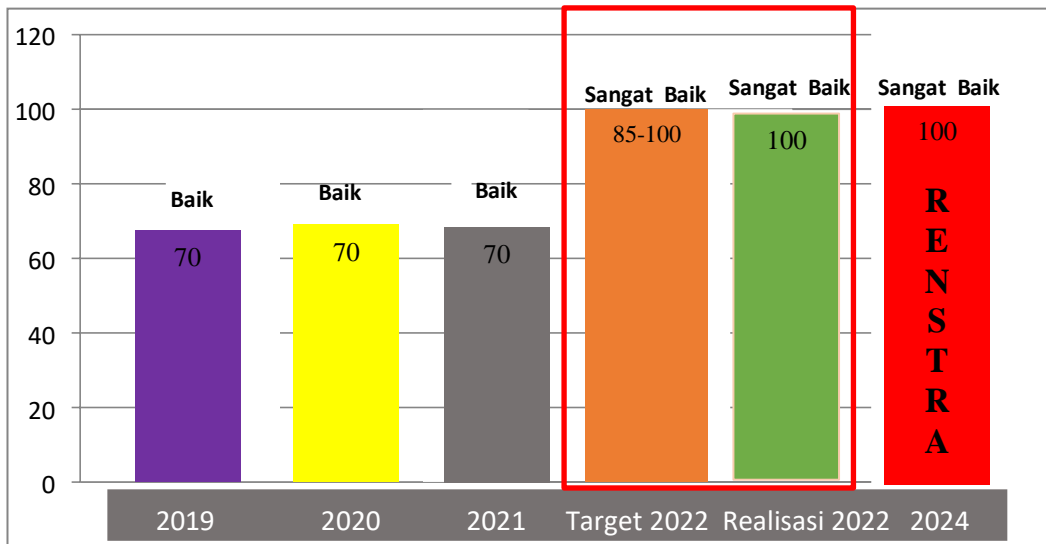
Dalam rangka mendukung indikator kinerja penangan potensi konflik didaerah sepanjang tahun 2022 didapat Frekuensi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar menurut kelompok pelaku yang berpotensi konflik sosial sabagi berikut :

No	Kelompok Massa	2022
1	Karyawan	1
2	Mahasiswa	5
3	Masyarakat	13
4	Ormas / Parpol	13
	Jumlah	32

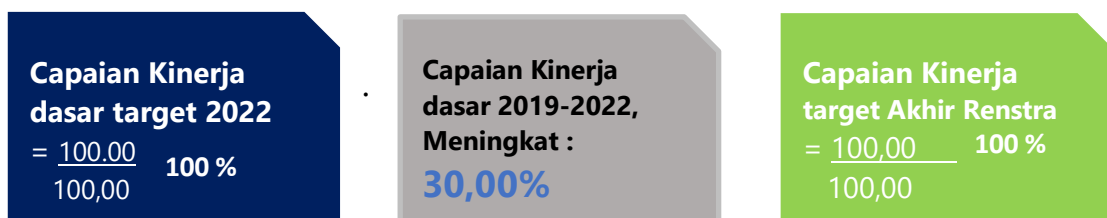
Frekuensi unjuk rasa di Kabupaten Polewali Mandar menurut tuntutan

No	Tuntutan	2022
1	Politik	4
2	Ekonomi	8
3	Sosbud	20
	Jumlah	32

Chart 3.3
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
 Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional , Januari 2022



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2022 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan potensi konflik di daerah tahun 2020 berada di level yang sama dengan tahun 2019 mencapai (70 %). Capaian ini dipengaruhi peningkatan Penanganan potensi konflik dengan lebih intens tim kewaspadaan dini daerah atas dukungan Forkopimda dalam melakukan pendekatan terhadap kelompok yang akan

melakukan aksi unjuk rasa sehingga target penanganan potensi konflik pada tahun 2022 dapat tercapai

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Dengan adanya regulasi tersebut telah melibatkan unsur intelijen dari Kodim, Polres, BIN, Bais dalam mendukung tugas Pemerintah daerah dalam melakukan cegah dini dan deteksi dini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di daerah

Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas TKDD dalam mendeteksi potensi konflik baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memadai.
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Mengupayakan lebih intens berkomunikasi dengan instansi vertikal terkait ke intelijen dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka cegah dini dan deteksi dini
- Bekerjasama dengan dinas kominfo SP kabupaten polewali mandar dalam menyebarkan informasi terkait Pendidikan politik kepada masyarakat.
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan Kewaspadaan Dini dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp. 450.694.600,-	Rp. 448.848.300,-	99,60
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Rp. 134.636.600,-	Rp. 132.788.300,-	98,60
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	RP. 316.060.000,-	RP. 316.060.000,-	100

Gambar 3.4 : Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah



Foto : Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Polewali Mandar



Foto : Tim Kewaspadaan Dini Daerah sedang memantau Aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar



Foto : Rapat Forkopimda Usai Upacara Hari Bela Negara Tahun 2022
sekaligus membahas isu-isu strategis daerah

**Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	74,29%	74,29%

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan disamping sebagai wahana berkumpul bagi anggota juga harus senantiasa membawa kiprahnya ditengah-tengah pergaulan umat manusia yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya. Untuk itu kehadirannya sangat strategi dalam mendorong pembangunan di wilayahnya untuk bersama-sama membangun kehidupan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemartabatan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan akses-akses lainnya. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 yang merupakan mitra Pemerintah .

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poleweali Mandar secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya, sesuai

dengan amanat undang-undang tersebut. Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan serta bantuan hibah Organisasi Kemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk Tahun 2022. Hal ini dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran atau kondisi tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Polewali Mandar, setelah dilakukannya beberapa kali pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut sepanjang Tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya. Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, mengidentifikasi masalah yang timbul terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, melakukan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol sudah tepat dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Ormas, dan mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran Progres, serta memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.

Maka predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran IV untuk tahun 2022, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang meliputi :

1. Monitoring evaluasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh tim terpadu organisasi kemasyarakatan yang untuk tahun 2022 ini yang ditargetkan sebanyak 60 ormas dari 104 ormas yang terdaftar pada badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten polewali mandar dengan persentase capaian 57,69 % dari jumlah ormas yang terdaftar kegiatan monitoring dan evaluasi Organisasi kemasyarakatan baru tahun 2022 dilaksanakan dimana untuk tahun-tahun sebelumnya kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan kepada ormas tersebut.
2. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi kemsayarakatan dengan memberikan bantuan dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dari target yang diberikan 11 ormas yang terealisasi sebanyak 10 ormas dengan persentase capaian 90.90 %

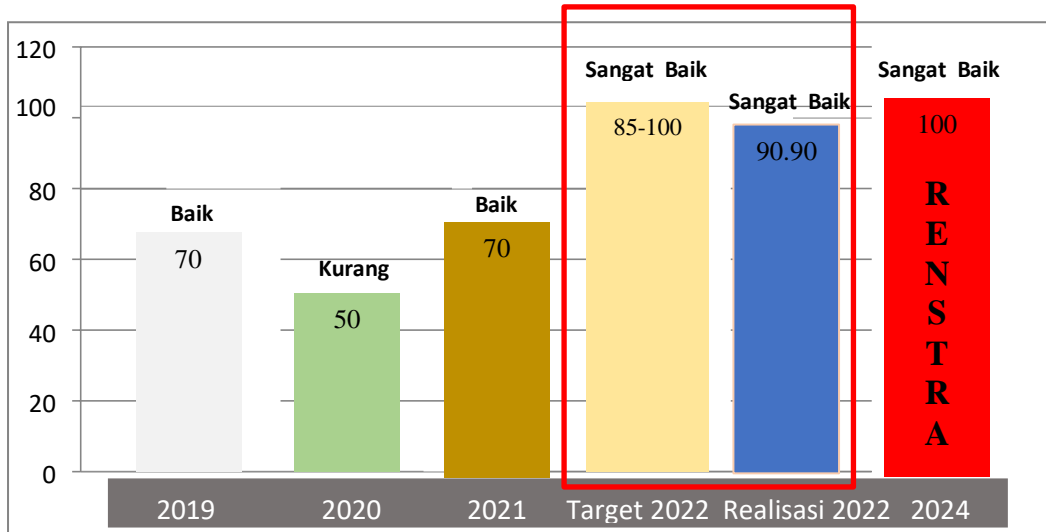
Namun demikian dalam upaya untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan ormas mencapai 90.90 % sepanjang tahun 2022 yaitu dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan ormas yang semula ditarget 11 ormas yang terealisasi 10 ormas.

Adapun organisasi kemasyarakatan yang diberikan bantuan hibah parpol sesuai SK Bupati Polewali Mandar Nomor 1079 Tahun 2022 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Keterangan
1.	Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK)	Jl. Empat Lima Dusun Jombang Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo	5.000.000,-	Tidak Menerima
2	Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP-HAM)	Jl. Gatot Subroto Kelurahan Madatte Kec. Polewali	5.000.000,-	Menerima
3	Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)	Jl. Barata Desa Rea Kecamatan Binuang	5.000.000,-	Menerima

4	Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN)	Jl.Mesjid Jami Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali	5.000.000,-	Menerima
5	DPP Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA)	Jl.Bahari Lingkungan Pasar Baru Kelurahan Wattang Kec.Polewali	5.000.000,-	Menerima
6	DPD Lintas Pemburu Keadilan	Jl.Semangka Kelurahan Wattang Kec.Polewali	5.000.000,-	Menerima
7	DPD Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK)	Kampung Tangnga Kelurahan Matakali Kec.Matakali	5.000.000,-	Menerima
8	Lembaga Bhakti Pertiwi	Jl.Inpres Sidodadi Kecamatan Wonomulyo	5.000.000,-	Menerima
9	DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI)	Jl.Poros Mamasa Kelurahan Anreapi Kec.Anreapi	5.000.000,-	Menerima
10	Komando Bersama Rakyat (KOBRA)	Jl. Bayang Kara Kelurahan Darma Kec.Polewali	5.000.000,-	Menerima
11	Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA)	Lingkungan Masigi Kelurahan Wattang Kec.Polewali	5.000.000,-	Menerima

Chart 3.4
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
 Terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional , Januari 2022



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2022 mencapai 90.90 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 29,90 % dari kondisi tahun 2019 yang saat itu predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat (70%). Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2020 berada di level yang sama kurang dengan mencapai (50 %) disebabkan kegiatan pemberdayaan ormas tidak dilakukan, hanya sebatas monitoring evaluasi dan pelaporan ormas. Capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 90.90 %

disebabkan pemberdayaan dan monitoring dan evaluasi ormas lebih intens dilakukan serta adanya bantuan hibah ormas yang telah diberikan pada tahun 2022.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 90,90%.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- Dengan adanya regulasi tersebut telah melibatkan unsur intelijen dari Kodim, Polres, BIN, Bais dan Kementerian Agama dalam mendukung tugas Pemerintah daerah dalam melakukan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan keberadaan Ormas

Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Tim Terpadu Ormas dalam melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan ormas.
- Sekretariat Ormas Sudah ada yang tidak sesuai dengan yang ada didaftar sehingga menyulitkan tim dalam melakukan monev
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa mengajak ormas untuk melakukan dialog dalam menyikapi persoalan di daerah untuk senantiasa memberikan sumbangsih dan pemikiran untuk kemajuan daerah
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk melakukan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan pemberdayaan ormas.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 112.291.700,-	Rp. 107.291.700,-	95,54
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Rp. 112.291.700,-	Rp. 107.291.700,-	95,54

Gambar 3.5. Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Ormas dan Bantuan Hibah Ormas Tahun 2022



**Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**



Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target : Sangat Baik (85-100 %)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 pada sasaran Strategis 5, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (85-100)	100.00%	100.00%

Dalam mendukung sasaran strategis V terkait Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sesuai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan, penyalagunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika pada pasal 4 ayat 2 dilakukan sosialisasi berupa :

- a. Seminar
- b. Lokakarya
- c. Workshop
- d. Kegiatan keagamaan

- e. penyuluhan
- f. pagelaran seni
- g. dll

dan Peraturan Bersama Menteri agama dan meteri dalam negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat menjelaskan pada Bab III pasal 8 ayat 1 berbunyi FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Dan pada pasal 9 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalambentukrekomendasisebagaibahankebijakanbupati/walikota;
- d. melakukan soslalisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaanmasyarakat;dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Predikat indeks kepuasan masyarakat, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 85 – 100 : sangat baik
- nilai 70 – 84 : baik
- nilai 60 – 70 : cukup

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi indeks kepuasan masyarakat, dilaksanakan sebagai berikut :

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pada sasaran V untuk tahun 2022, target Indeks kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :

1. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan forum kerukunan umat serta pemilihan pengurus pengganti antar waktu periode 2017-2022 kegiatan ini dimaksudkan untuk senantiasa terus memberdayakan forum ini dalam pembinaan keagamaan dimana FKUB ini mempunyai fungsi melakukan berbagai upaya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama baik dalam bentuk dialog maupun mediasi untuk mencegah terjadinya konflik atau menyelesaikan perselisihan. Untuk target 2022 yang dilakukan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kerukunan umat beragama sebanyak 30 orang yang terdiri dari perwakilan keagamaan, tokoh masyarakat dan unsur pemuda dengan capaian realisasi yang mengikuti forum ini mencapai target 100 %
2. Kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada aparat pemerintah daerah untuk menyatukan pemahaman dalam melakukan cegah dini dan deteksi terhadap peredaran gelap narkoba sehingga ada kesepahaman dan komitmen dalam melakukan perang melawan narkoba, untuk tahun 2022 target sasaran sebanyak 30 orang perwakilan OPD dan terealisasi 100 % dari target yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan P4GN di Kabupaten Polewali Mandar.

Namun demikian dalam upaya untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat terhadap ketahanan ekonomi sosial dan budaya mencapai 100 % sepanjang tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan fasilitasi pencegahan, penyalagunaan narkoba dan fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayat kepercayaan didaerah yang semula ditarget 60 orang yang terealisasi 60 orang.

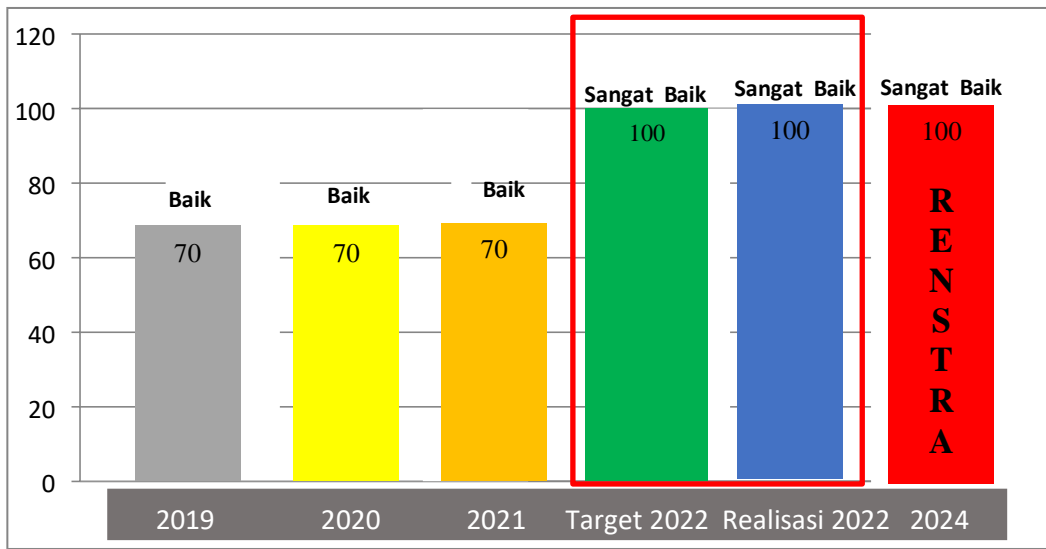
Data Kasus Narkoba Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2017	58	
2	2018	54	
3	2019	49	
4	2020	143	
5	2021	149	
6	2022	123	Sampai bulan Oktober

Sumber : Bidang Bina ideologi wawasan kebangsaan, karakter bangsa serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, tahun 2022

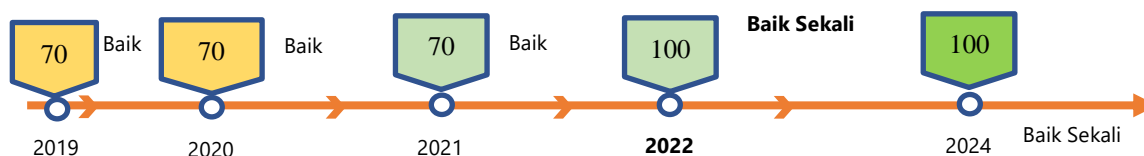
Chart 3.5
 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
 Target dengan Realisasi 2022, 2021-2020 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Bidang Bidang Bina Ideologi Wasbang, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekosbud , Januari 2022

Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2022 mencapai 100 %. Selanjutnya kondisi capaian 2022 ini meningkat sebesar 30,00% dari kondisi tahun 2019, 2020 dan 2021. Capaian tahun ini dipengaruhi peningkatan pemberdayaan dan sosialisasi kepada tokoh agama dalam menjaga kondusifitas keagamaan dan berhasil dalam cegah dini dan deteksi dini dalam menjaga kerukunan ummat beragama, dan dari data kasus narkoba sudah mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sebesar 26 kasus

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat baik sekali (100,00), maka kondisi saat ini sudah mencapai 100,00%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya regulasi terkait Forum Kerukunan Umat Beragama dan P4GN
- Telah terbentuknya Pengurus FKUB Masa Khidmat 2017-2022
- Sosialisasi terkait Peningkatan Toleransi kerukunan umat beragama dan sosialisasi P4GN dan koordinasi dengan BNNK dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba sudah gencar dilakukan ke semua kalangan

Faktor Penghambat :

- Belum adanya Perda terkait P4GN
- Belum terbentuknya Tim terpadu P4GN
- Dukungan anggaran yang belum maksimal dari pemerintah daerah

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol senantiasa mengajak Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan stakeholder terkait untuk melakukan dialog dalam menyikapi persoalan didaerah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke seluruh wilayah kabupaten polewali mandar dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan cega dini terhadap potensi munculnya konflik keagamaan dan potensi peredaran narkotika dimasyarakat
- Alokasi anggaran diupayakan lebih maksimal untuk kegiatan pemberdayaan dan Pembinaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap ketahanan ekonomi sosial dan budaya sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 67.128.800,-	Rp. 67.068.800,-	99,91
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 67.128.800,-	Rp. 67.068.800,-	99,91

Gambar 3.6. Kegiatan Peningkatan Toleransi Umat Beragama dan Sosialisasi P4GN



**Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah**



Predikat SAKIP perangkat daerah

Target : A

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Target : 100%

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Target : Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100 %	100 %	100 %
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	100 %

Indikator Kinerja I : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

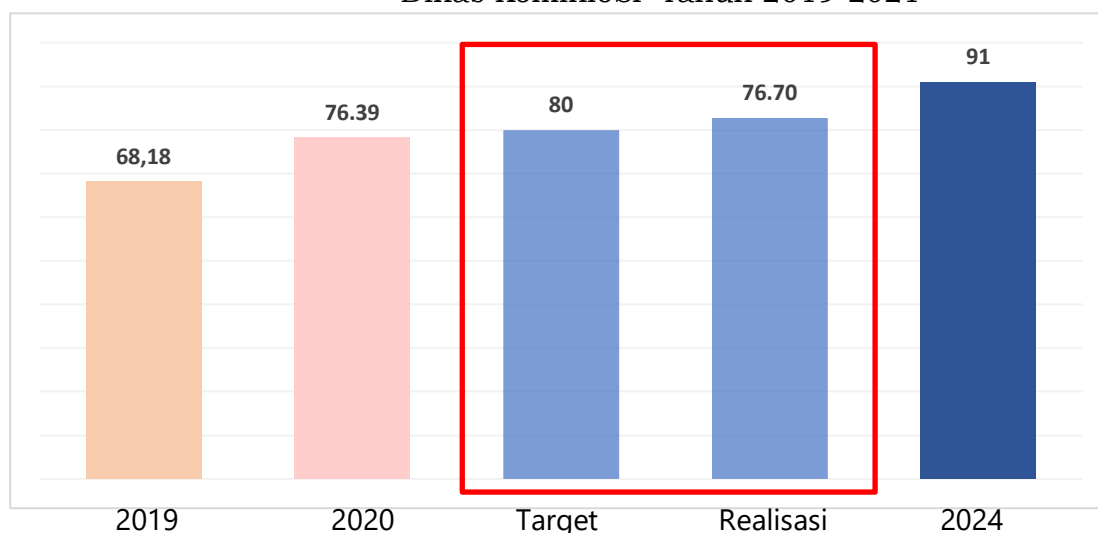
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan

Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan review oleh Inspektorat.

Komponen SAKIP	2019	2020	2021
Perencanaan Kinerja	28,85	28,28	28,30
Pengukuran Kinerja	19,07	22,50	22,50
Pelaporan Kinerja	6,88	9,88	9,70
Evaluasi Internal	3,38	5,20	5,20
Capaian Kinerja	10	10	11
Nilai	68,18	76,39	76,70
Predikat	BB	BB	BB

Adapun capaian Implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Chart 3.6
Perkembangan Implementasi SAKIP
Dinas KominfoSP Tahun 2019-2021



Capaian Kinerja target-realisasi 2021

$$= \frac{76.39}{80} \quad 95,48$$

Capaian Kinerja 2019-2021, Meningkat : 8,52 POINT

Capaian Kinerja target Akhir Renstra

$$= \frac{76.70}{91} \quad 84,28$$

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari segi Bobot Nilai, walaupun predikat BB pada tahun 2020 sampai dengan 2022 . Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja semakin membaik.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang : a. Tersedianya aplikasi e-SAKIP	Faktor Penghambat : a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja
Solusi : a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi	

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.812.500	93.75
-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000	750.000	100
-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	750.000	750.000	100
-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.312.500	87.5

Indikator Kinerja II : Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 3 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Analisis keberhasilan dan kegagalan

Faktor Penunjang : a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Badan Kesbangpol untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah	Faktor Penghambat : a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan b. Belum optimalnya tertib administrasi aset
Solusi : a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan	

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.888.045.159	1.874.708.152	99
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.887.264.659	1.873.927.652	99.30
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	780.500	780.500	100

Indikator Kinerja III : Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin membaik. Terdapat 4 (empat) layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, sebagai berikut :

1. Rekomendasi Izin Penelitian
2. Rekomendasi Izin Kegiatan
3. Surat Keterangan Keberadaan Ormas
4. Layanan Partai Politik

Tabel 3.7
Jenis Layanan Publik Non Pelayanan Langsung

No.	Nama Layanan	Waktu Penyelesaian	Bidang Penanggung Jawab
1	Rekomendasi Izin Penelitian	30-60 Menit	Bid. Bina Ideologi pada tahun 2020 sudah ada ASN Kesbangpol yang berada di DINAS PM PTSP untuk memberikan layanan kepada Mahasiswa
2	Rekomendasi Izin Kegiatan	30-60 menit	Bid. Bina Ideologi
3	Pelayanan SKT ormas dan Surat keterangan Keberadaan Ormas	30-60 Menit	Bid. Ormas
4.	Layanan Partai Politik	30-60 Menit	Bid. Poldagri

Mencermati Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholders atas 4 jenis layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 mencapai indeks diatas 92,41 % atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Sebagai pengelola data sectoral kategori C Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2022 ini meningkat dari Tahun Ketahun yang masih berada di kategori Baik, Tingginya motivasi kerja pegawai serta meningkatnya perhatian Perangkat Daerah terhadap layanan yang disediakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , turut berpengaruh terhadap capaian kinerja kepuasan pelayanan publik. Tahun 2022, capaian kinerja kepuasan layanan publik meningkat sangat pesat. Adanya dukungan perkembangan teknologi informasi secara nyata sangat berpengaruh terhadap capaian ini. Selanjutnya, capaian tahun 2022 ini menunjukkan sudah tercapai 92,41 % dari target jangka menengah yang

tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

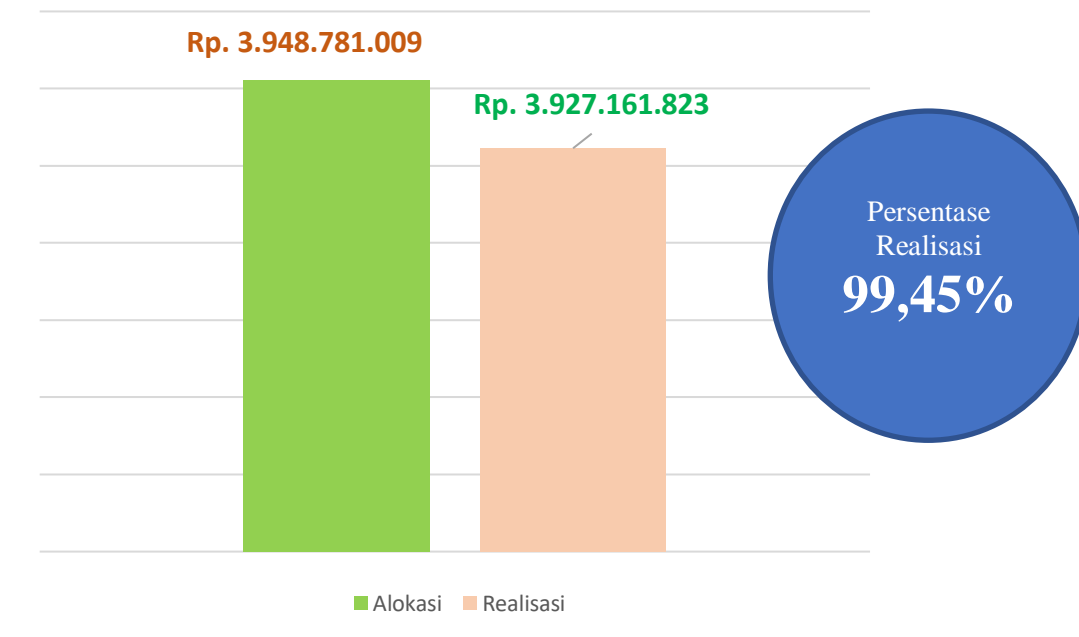
Faktor Penunjang : <ul style="list-style-type: none">a. Tingginya motivasi kerja Pegawaib. Adanya perkembangan teknologi dan informasic. Meningkatnya perhatian Masyarakat, Ormas dan Partai Politik terhadap layanan yang disediakan Badan Kesbangpol	Faktor Penghambat : <ul style="list-style-type: none">a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layakb. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan
Solusi : <ul style="list-style-type: none">a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawaib. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja	

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Badan Kesbangpol, dapat disajikan sebagai berikut:

Chart 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :

Tabel 3.8
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Kesbangpol Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan di Daerah	100	85	85%	Rp 51.765.800	Rp 51.755.800	99.98	0.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat								
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik dalam Negeri di daerah	100	100	100%	Rp 1.002.989.800	Rp 1.002.701.400	99.97	0.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Indeks Kepuasan Masyarakat								
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan konflik di daerah	100	100	100%	Rp 450.694.600	Rp 448.848.300	99.59	0.41	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
	Indeks Kepuasan Masyarakat								
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat	100	90.90	90.90	Rp 112.291.700	Rp. 107.291.700	95.54	4.46	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Indeks kepuasan masyarakat								
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100	100	100	Rp. 67.128.800	Rp. 67.068.800	99.91	0.09	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
	Indeks kepuasan masyarakat								
6	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	BB	BB	76.39	Rp 3.000.000	Rp 2.812.500	93.75	6.25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP Perangkat daerah								
	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah	100	100	100	Rp 1.888.045.159	Rp 1.874.708.152	99.29	0.71	
	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	92.41	Rp 372.865.150	Rp 371.975.171	99.76	0.24	
JUMLAH				93.09	Rp 3.949.781.009	Rp 3.927.161.823	99.45	0.55	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 sebesar 93.09%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 0.55%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 99.45% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 93.09%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Badan Tahun 2022. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan

dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan sebesar 93,09 % serta capaian kinerja keuangan sebesar 99,45 %. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 0,55%.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

1. Secara umum, agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dapat ditingkatkan.
2. Agar ditingkatkan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada level Eselon IV, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.



Kepala Badan Kesbangpol

Asliah Rahim, S.Sos.,M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19680428 198910 2 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Politik Dalam Negeri di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Penanganan Potensi Konflik di Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Persentase tertib Pengelolaan Keuangan dan asset Perangkat Daerah	100 %
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	2,490.907,457	APBD
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	51,765,800	APBD
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Pengembangan Etikas serta Budaya Politik	Rp	1,098,989,800	APBD
4	Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	286,194,600	APBD

5.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	64,939,600	APBD
6.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	67,128,800	APBD
JUMLAH			4,059,926,057	APBD

Polewali, 21 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

ASLIAH RAHIM, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19860428 198910 2 001